



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR



## LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020 BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR

# KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Surabaya, 30 Januari 2021  
Kepala Sekretariat

Sapni Syahril, S.IP.,M.Si

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1-2
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7-46
A. Penjelasan Umum	7-14
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	15-27
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	28-36
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	37-42
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	43-44
F. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya	45-46
<b>VI. Lampiran-Lampiran Laporan Keuangan Audited Tahun 2020</b>	
a. Lampiran I SSBP dan SSPB	
b. Lampiran II Output Aplikasi Saiba	
c. Lampiran III Output Aplikasi E-Rekon	
d. Lampiran IV Output Aplikasi Simak	
e. Lampiran V Rincian Kas APBN 2020	
f. Lampiran VI Rincian Kas Hibah 2020	
g. Lampiran VII Jurnal-Jurnal Koreksi 2020	

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Surabaya, 30 Januari 2021  
Kepala Sekretariat

SAPNI SYAHRIL, S.IP.,M.Si

# RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

## 1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp209.829.985,00

Realisasi Belanja Negara pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp353.856.733.819,00 atau mencapai 84,09% dari alokasi anggaran sebesar Rp420.784.939.000,00.

## 2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020.

Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp56.499.803.766,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp48.445.811.720,00; Aset Tetap (*netto*) sebesar Rp7.965.669.090,00; dan Aset Lainnya (*netto*) sebesar Rp88.322.956,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.615.223.705,00 dan Rp54.884.580.061,00.

## 3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp36.374.258,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp376.575.342.384,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp376.538.968.126,00. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp835.683.315,00 dan sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp375.703.284.811,00.

## 4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp38.961.411.733,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp375.703.284.811,00 ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp391.626.453.139,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp54.884.580.061,00.

## 5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan

serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

URAIAN	CATATAN	31-Des-20		% thd Angg	TA 2019 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		
<b>PENDAPATAN DAN HIBAH</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	209.829.985	-	877.009.827
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	<b>209.829.985</b>	-	<b>877.009.827</b>
<b>BELANJA</b>	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	31.060.107.000	28.232.012.631	90,89	32.686.502.809
Belanja Barang	B.4	389.173.518.000	325.238.065.858	83,57	458.167.402.895
Belanja Modal	B.5	551.314.000	386.655.330	70,13	1.054.133.236
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>420.784.939.000</b>	<b>353.856.733.819</b>	<b>84,09</b>	<b>491.908.038.940</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

**NERACA**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

URAIAN	CATATAN	31-Des-20	Tahun 2019
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1	48.435.414.317	14.848.894.884
Belanja Dibayar di Muka	C.2	-	11.219.520.000
Persediaan	C.3	10.397.403	2.870.863.132
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>48.445.811.720</b>	<b>28.939.278.016</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Peralatan dan Mesin	C.4	17.371.317.012	16.626.118.463
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.5	9.375.000	9.375.000
Aset Tetap Lainnya	C.6	1.374.581.129	1.173.051.529
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.7	(10.789.604.051)	(7.658.420.279)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>7.965.669.090</b>	<b>10.150.124.713</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tidak Berwujud	C.8	98.500.000	49.500.000
Aset Lain-Lain	C.9	88.978.252	1.048.474
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.10	(99.155.296)	(43.705.677)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>88.322.956</b>	<b>6.842.797</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>56.499.803.766</b>	<b>39.096.245.526</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.11	1.584.010.096	12.576.735
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.12	31.213.609	122.257.058
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>1.615.223.705</b>	<b>134.833.793</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>1.615.223.705</b>	<b>134.833.793</b>
<b>EKUITAS</b>			
EKUITAS	C.13	54.884.580.061	38.961.411.733
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>54.884.580.061</b>	<b>38.961.411.733</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>56.499.803.766</b>	<b>39.096.245.526</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

URAIAN	CATATAN	31-Des-20	Tahun 2019
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	36.374.258	60.831.564
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>36.374.258</b>	<b>60.831.564</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	28.232.012.631	32.686.502.809
Beban Persediaan	D.3	8.222.928.894	77.188.505
Beban Barang dan Jasa	D.4	263.209.224.505	332.923.185.640
Beban Pemeliharaan	D.5	5.542.212.178	4.833.703.139
Beban Perjalanan Dinas	D.6	68.182.330.785	123.991.904.701
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	3.186.633.391	3.112.795.300
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>376.575.342.384</b>	<b>497.625.280.094</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(376.538.968.126)</b>	<b>(497.564.448.530)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	D.8		
<b>Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar</b>		<b>103.846.477</b>	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		103.846.477	-
<b>Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>		<b>731.836.838</b>	<b>812.116.929</b>
Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya		3.717.672.337	817.675.074
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		2.985.835.499	5.558.145
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>835.683.315</b>	<b>812.116.929</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(375.703.284.811)</b>	<b>(496.752.331.601)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>	D.9	-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>	D.10	<b>(375.703.284.811)</b>	<b>(496.752.331.601)</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

URAIAN	CATATAN	31-Des-20	Tahun 2019
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	<b>38.961.411.733</b>	<b>30.239.151.811</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>	E.2	<b>(375.703.284.811)</b>	<b>(496.752.331.601)</b>
<b>KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR</b>	E.3	<b>0</b>	<b>(331.558.728)</b>
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2		
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.3		
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4		
KOREKSI NILAI ASET TETAP/LAINNYA NON REVALUASI	E.3.5		
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6		(331.558.728)
<b>JUMLAH</b>			
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>	E.4	<b>391.626.453.139</b>	<b>505.806.150.251</b>
<b>KENAIKAN/PENURUNAN</b>	E.5	<b>15.923.168.328</b>	<b>8.722.259.922</b>
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.6	<b>54.884.580.061</b>	<b>38.961.411.733</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

## A. Penjelasan Umum

### A.1 Dasar Hukum dan Profil Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi JAWA TIMUR

#### 1. Dasar Hukum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
  1. Pelanggaran Pemilu; dan
  2. Sengketa proses Pemilu.
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
  1. pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
  2. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
  4. penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
  5. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
  6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
  8. penghitungan suara di wilayah kerjanya;
  9. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
  10. rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
  11. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  12. penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi.
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah, provinsi, yang terdiri atas:
  1. putusan DKPP;
  2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
  3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
  4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
  5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini;

- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
- h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- k. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- l. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- m. Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- n. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- o. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- p. Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- q. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2. Profil Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur**

Sesuai dengan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi dipimpin oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi. Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur adalah Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang diklasifikasikan

pada Kelas A. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi membawahi 4 (empat) Kepala Bagian dan 8 (delapan) Kepala Sub Bagian, yaitu :

- 1. Kepala Bagian Administrasi terdiri dari:**
  - a. Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara; dan
  - b. Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia dan Umum.
- 2. Kepala Bagian Pengawasan terdiri dari:**
  - a. Kepala Subbagian Pengawasan dan Akreditasi Pemantau; dan
  - b. Kepala Subbagian Hubungan Antar Lembaga.
- 3. Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses terdiri dari:**
  - a. Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran; dan
  - b. Kepala Subbagian Penyelesaian Sengketa Proses.
- 4. Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi terdiri dari:**
  - a. Kepala Subbagian Hukum; dan
  - b. Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi.

## **A.2 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

## **A.3 BASIS AKUNTANSI**

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### **A.4 DASAR PENGUKURAN**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### **A.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

##### **(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

##### **(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
  - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
  - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### **(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

#### **a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan

piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih**

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan	
<b>Lancar</b>	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
<b>Kurang Lancar</b>	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
<b>Diragukan</b>	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
<b>Macet</b>	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan
  - \* harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - \* harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - \* harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

**b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
  - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah;
  - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap**

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

#### **d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

#### **e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

#### **(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - Kewajiban Jangka Pendek  
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - Kewajiban Jangka Panjang  
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

#### **(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak Delapan kali dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian program kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain:

Tabel 3. Pagu Anggaran

Uraian	2020	
	ANGGARAN	ANGGARAN
	AWAL	SETELAH REVISI
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	71.583.655.000	31.060.107.000
Belanja Barang	87.579.186.000	389.173.518.000
Belanja Modal	32.486.741.000	551.314.000
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>191.649.582.000</b>	<b>420.784.939.000</b>

Revisi tersebut antara lain berupa Pengurangan Pagu pada Belanja Pegawai dan Belanja Modal yang dialihkan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Dan adanya Penambahan Belanja Barang Terkait Hibah sebesar Rp292.658.282.000,00 dan Belanja Operasional untuk Penanganan Covid-19 sebesar Rp33.855.465.000,00.

### B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp209.829.985,00** atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 0. Pendapatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur terdiri dari Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya, Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) dan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2020

No	Uraian	2020		
		Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	103.846.477	-
2	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	37.754.741	-
3	Penerimaan kembali belanja barang TAYL	-	68.228.767	-
	<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>209.829.985</b>	<b>-</b>

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya per 31 Desember 2020 berasal dari proses Lelang Buku Saksi Parpol yang dilaksanakan di 5 Cluster, yang terdiri atas:

**Tabel 4.1 Rincian Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya Per 31 Desember 2020**

No	Cluster	Tanggal Pelaksanaan	Nilai Limit	Nilai Jual	NTPN
1	Pamekasan	04/12/2020	1.870.647	2.400.000	DECC91JNEQF9M5LD
2	Surabaya	20/11/2020	19.876.500	33.688.899	DCA1A7QLTKDF6N4G
3	Sidoarjo	02/12/2020	8.206.109	15.757.578	F1BD055DE4004A1N
4	Jember	07/12/2020	19.389.346	34.594.000	D284D61QTVB4I4BK
5	Jember	09/12/2020		706.000	16A3461QTVB5J5DS
6	Madiun	09/11/2020	13.502.761	16.700.000	8C03F2G4UKV3N2TI
<b>JUMLAH</b>			<b>62.845.363</b>	<b>103.846.477</b>	

Dokumen terkait proses Lelang Buku Saksi Parpol akan kami Lampirkan pada Lampiran Laporan Keuangan ini, pada **Lampiran I**.

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) per 31 Desember 2020 berasal dari Rekening Hibah Pilkada yang dikelola 19 Bawaslu Kab/Kota se-Jawa Timur yang telah disetorkan ke Kas Negara, yang terdiri atas:

**Tabel 4.2 Rincian Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) Per 31 Desember 2020**

NAMA WAJIB BAYAR / SETOR	TANGGAL BUKU	NTB/NTP	NTPN	KODE AKUN	SETORAN PER AKUN (Rp)
Bawaslu Kab. Gresik (2019)	02/01/2020	200102690365	3D99F0N9UURS883Q	425764	118.215
BPP KAB BLITAR (2019)	07/01/2020	200107826129	5C65C3CIEEJ4MTTJ	425764	62.425
BPP KAB BLITAR (2019)	07/01/2020	200107826289	403337QLTJF2NVF4	425764	152.991
BPP KAB BLITAR (2019)	07/01/2020	200107826289	403337QLTJF2NVF4	425764	97.171
Bawaslu Kab.Malang (2019)	14/01/2020	200114170482	9846C2G4UK0VPPTO	425764	984.886
Bawaslu Kab.Malang	31/01/2020	200131810699	A155A55DE3OLUC4D	425764	1.808.719
KOTA BLITAR	07/02/2020	931496697182	092B36U8DOVMS5FR	425764	625.601
RPL 031 BAWASLU KAB BLITAR	17/02/2020	917590561958	864B70N9UUV55VRU	425764	576.502
BPP BAWASLU KAB BLITAR	11/03/2020	200311421542	DB5317QLTJL027PI	425764	7.976.463
bppbaswaslukotamadiun	16/03/2020	942696587106	535816U8DP2S45IV	425764	1.370
Bawaslu Kab.Malang	17/03/2020	200317682203	DCE7E6U8DP304VRP	425764	519.483
Bawaslu Kab.Malang	31/03/2020	200331069498	4DC0A7QLTJLPOD9U	425764	36.814
Bawaslu Kota Blitar	30/04/2020	946257367986	397A27QLTJOO3JC8	425764	624.494
BPP Bawaslu Kabupaten Bojonegoro	06/05/2020	964125048071	2509F6U8DP8KE9O9	425764	69.303
Bawaslu Kab.Malang	15/05/2020	200515233043	912710N9UV82L2RI	425764	145.671
Bawaslu Kab.Malang	12/06/2020	200612235698	6A9498N3DEGG3H6V	425764	296.062
Bendahara Pengeluaran	17/06/2020	200617467603	143FE61QTUPHSH0S	425764	6.500
Bawaslu Kab Malang	01/07/2020	200630111557	E339348VU9L5ADT8	425764	631.401
Bawaslu Kab.Malang	06/08/2020	200805055520	0298C55DE4CO3K0H	425764	3.977.573
Bawaslu Kab. Gresik	27/08/2020	200827097616	15F937QLTK4GJ916	425764	89.490
Bawaslu Kota Surabaya	23/11/2020	000013276708	E243C61QTV8K879U	425764	797.246
Bawaslu Kab.Malang	22/12/2020	201222149632	F61AC3CIEFKDODTH	425764	1.342.592
BPP Bawaslu Sumenep	29/12/2020	001823800091	D7CF961QTVBO0SOC	425764	16.768.669
BP Bawaslu Jatim	30/12/2020	201230655055	5349D7QLTKGHUEMQ	425764	45.100
<b>Total LRA</b>					<b>37.754.741</b>

Bukti setor telah kami lampirkan pada lampiran laporan keuangan periode 31 Desember 2020, pada **Lampiran I**.

Penerimaan kembali belanja barang TAYL per 31 Desember 2020 berasal dari temuan BPK dan Pengawas Internal Bawaslu Republik Indonesia atas belanja barang tahun 2019 atau sebelumnya yang terdiri atas:

**Tabel 4.3 Rincian Penerimaan kembali belanja barang TAYL Per 31 Desember 2020**

NAMA WAJIB BAYAR / SETOR	TANGGAL BUKU	NTB/NTP	NTPN	KODE AKUN	SETORAN PER AKUN (Rp)
Setoran BPK 2019 Kab Pasuruan	10/02/2020	200207067818	A58267QLTJ3963S	425912	5.000.000
Setoran BPK 2019 Bawaslu Provinsi	16/12/2020	201216787042	0BF2A1JNEQFDPNL3	425912	200.000
Setoran atas temuan Pengawas Internal Bawaslu Pamekasan	30/12/2020	201218926580	182463CIEFK8MLID	425912	63.028.767
<b>Total LRA</b>					<b>68.228.767</b>

Bukti setor telah kami lampirkan pada lampiran laporan keuangan periode 31 Desember 2020, pada **Lampiran I**.

Realisasi Pendapatan Jasa 31 Desember 2020 sebesar **Rp209.829.985,00** mengalami Penurunan **76,07%** atau sebesar Rp667.179.842,00 dibandingkan TA 2019 sebesar Rp877.009.827,00. Hal ini disebabkan oleh :

1. Kecilnya angka temuan BPK pada pemeriksaan 2019;
2. Pada tahun 2020 terdapat Lelang sisa Buku Saksi Parpol yang belanjanya pada 2019 dan telah dilakukan proses penghapusan berupa Lelang pada 2020.

**Tabel 5. Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2020 dan 2019**

URAIAN	31-Des-20	31-Des-19	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	37.754.741	66.086.456	(42,87)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	68.228.767	809.678.521	(91,57)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	1.145.450	(100,00)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	99.400	(100,00)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	103.846.477	-	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>209.829.985</b>	<b>877.009.827</b>	<b>(76,07)</b>

Bukti setor telah kami lampirkan pada lampiran laporan keuangan periode 31 Desember 2020, pada **Lampiran I**.

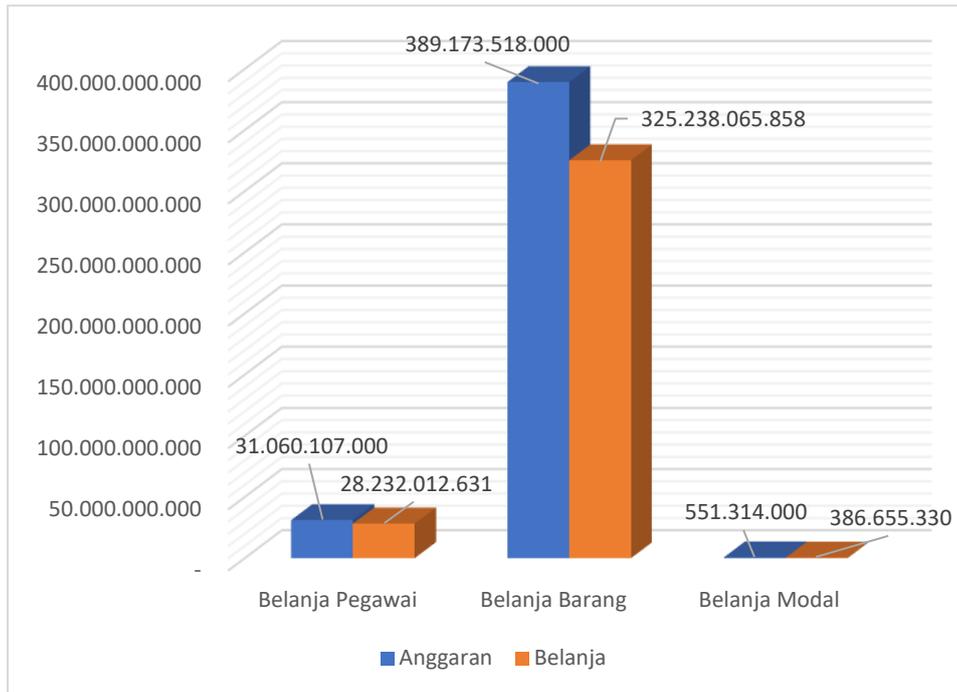
## B.2 Belanja

Realisasi Belanja pada 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp353.856.733.819,00** atau **84,09%** dari anggaran belanja sebesar Rp420.784.939.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 6. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2020 dan 2019**

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	31.060.107.000	28.232.012.631	90,89
Belanja Barang	389.173.518.000	325.238.065.858	83,57
Belanja Modal	551.314.000	386.655.330	70,13
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>420.784.939.000</b>	<b>353.856.733.819</b>	<b>84,09</b>
Pengembalian	-	107.535.642	
<b>Jumlah</b>	<b>420.784.939.000</b>	<b>353.964.269.461</b>	<b>84,12</b>

**Grafik 1. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja**



Rekapitulasi Belanja Negara sebesar Rp353.856.733.819,00 merupakan hasil pengurangan dari Realisasi Belanja Bruto sebesar Rp353.964.269.461,00 dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp107.535.642,00.

Pengembalian belanja sebesar Rp107.535.642,00 merupakan pengembalian belanja tahun anggaran berjalan yang terdiri dari:

**Tabel 7. Rincian Pengambalian Belanja 31 Desember 2020 dan 2019**

No.	No. NTB	No. NTPN	TGL.DOK	AKUN	Rupiah
1	256184	8C0763CIEEJPV46H	28/01/2020	524111	Rp 48.325
2	200205930363	5461D61QTUD87ODA	05/02/2020	522151	Rp 900.000
3	200205930363	5461D61QTUD87ODA	05/02/2020	524114	Rp 520.000
4	000000047259	16D588N3DE4FNASP	07/02/2020	524111	Rp 1.504.410
5	200219556221	B2AD00N9UUV9DP50	19/02/2020	524111	Rp 165.300
6	200219555984	764BB2G4UK4378VM	19/02/2020	524119	Rp 215.000
7	485297	4359C3CIEEMGOUA9	26/02/2020	524111	Rp 1.206.400
8	495122	29AA67QLTJIM02F8	26/02/2020	524111	Rp 1.072.000
9	503796	5780E48VU994C1JK	26/02/2020	524111	Rp 1.072.000
10	929895503999	908813CIEESBPCOD	15/04/2020	511332	Rp 900
11	929992504015	257947QLTJO9QD86	15/04/2020	511332	Rp 900
12	200602746280	87B4D6U8DPBG497V	02/06/2020	524111	Rp 23.097.542
13	200701175175	027A91JNEQ03URPT	01/07/2020	524111	Rp 309.700
14	2589561818	7555C0N9UVDJRJCS	07/07/2020	524111	Rp 364.900
15	74392	D97A96U8DPEIETAR	07/07/2020	524111	Rp 108.237
16	73153	E5B186U8DPEIETO9	07/07/2020	524111	Rp 123.915
17	3984	2CB9155DE49PKV15	07/07/2020	524111	Rp 37.268
18	126062	6E37561QTUSE87GI	14/07/2020	524111	Rp 1.000
19	200715024386	A57560N9UVE4RH50	15/07/2020	524111	Rp 348.857
20	718235	626553CIEF5C4GDN	17/07/2020	524111	Rp 420.275
21	FT20202MLW3T	DEB420N9UVE9SJKO	20/07/2020	524111	Rp 128.222
22	200730838614	2582D7QLTK1MEOFI	30/07/2020	522151	Rp 1.710.000
23	200730839585	0DEF16U8DPFA1PO5	30/07/2020	522151	Rp 1.710.000
24	200730838780	62FE23CIEF5ODOB1	30/07/2020	524111	Rp 4.532.500
25	484743	9FD447QLTK3S5KVO	05/08/2020	524111	Rp 2.266.300
26	FT20252RFLCY	F75981JNEQ696RGV	08/09/2020	524111	Rp 49.168
27	1660000098	140F58N3DEPEGM87	10/09/2020	524114	Rp 195.000
28	200915052158	F3EFD61QTV2E80I0	15/09/2020	524111	Rp 2.369.756
29	200915052213	A95980N9UVK3Q0PA	15/09/2020	521219	Rp 22.850.000
30	200915052213	A95980N9UVK3Q0PA	15/09/2020	524113	Rp 3.900.000
31	200915052336	AC2546U8DPKQL17T	15/09/2020	521219	Rp 3.500.000
32	323355	F2F422G4UKP27A5K	21/09/2020	524111	Rp 66.878
33	Potongan SPM	200311304010526	23/09/2020	511119	Rp 123
34	200924513762	38AFB7QLTK7EVURK	24/09/2020	524114	Rp 1.000.000
35	200924513850	A9E918N3DEPRD4BT	24/09/2020	524113	Rp 100.000
36	201006079026	29D371JNEQ6UGO8N	06/10/2020	524111	Rp 389.436
37	000000579481	28B8055DE4J4H2O5	19/10/2020	522151	Rp 125.000
38	201023971410	A9E287QLTKACT8DI	23/10/2020	524111	Rp 52.100
39	948355839249	0726F3CIEFGRF0H9	05/11/2020	524114	Rp 100.000
40	948356839250	BBE9C7QLTKCPG0GQ	05/11/2020	524114	Rp 100.000
41	364236926347	2854855DE4M1HFC9	16/11/2020	524111	Rp 82.894
42	201117153422	FDC388N3DEVJ6HG9	17/11/2020	524111	Rp 1.000
43	201117154319	FDC388N3DEVJ6HG9	17/11/2020	524111	Rp 32.340
44	201204124216	26A060N9UVSJTCEG	04/12/2020	521219	Rp 15.175.000
45	201204124316	3EBD57QLTKFN5BVQ	04/12/2020	524111	Rp 6.415.200
46	201204124368	46AE68N3DF23ID4D	04/12/2020	524111	Rp 5.966.027
47	201217900023	7804855DE4P1GQ3F	17/12/2020	524111	Rp 171
48	962675653205	45BFB55DE4P6J6C3	22/12/2020	511332	Rp 4.500
49	201223000061	9FD782G4UL1T9SG2	23/12/2020	524111	Rp 100.000
50	201223278192	1D8671JNEQFL2999	23/12/2020	521111	Rp 25.000
51	201229527742	265DB2G4UL21GAA6	29/12/2020	524111	Rp 40.034
52	201229558782	0C16C7QLTKGGQT6G	29/12/2020	521211	Rp 166.774
53	201229558901	6ADE048VUA6V6S9U	29/12/2020	524111	Rp 86.579
54	201229558998	3AE5C1JNEQFPVR59	29/12/2020	524111	Rp 217.200
55	201229559086	BCE4D7QLTKGGQRR2	29/12/2020	524111	Rp 186.309
56	201216786802	986216U8DPTO5RLJ	16/12/2020	524111	Rp 68.400
57	201216786959	263302G4UL1Q4R6O	16/12/2020	524111	Rp 50.400
58	201216787100	8AB9A8N3DF2H1KRB	16/12/2020	524111	Rp 260.400
59	201216787161	B807A6U8DPTO5Q1N	16/12/2020	524111	Rp 1.000.000
60	201230684025	31E1761QTVBP4ODM	30/12/2020	524111	Rp 2
61	201231795266	3BAF955DE4PEO1K9	31/12/2020	524111	Rp 96.000
62	201231795444	C487C1JNEQFT41RB	31/12/2020	522151	Rp 900.000
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp 107.535.642</b>

Bukti setor telah kami lampirkan pada lampiran laporan keuangan periode 31 Desember 2020, pada **Lampiran I**.

Dibandingkan dengan 2019, Realisasi Belanja 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar **28,06%** dibandingkan realisasi belanja pada periode 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan :

1. Realisasi belanja yang dilakukan oleh 38 Bawaslu Kabupaten/Kota tahun 2020 sempat mengalami penundaan dikarenakan Pandemi dan beberapa kegiatan tatap muka Paket Meeting dialihkan kegiatan daring;
2. Adanya Surat Keputusan Ketua Bawaslu RI yang diteruskan Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur terkait Pembatasan jumlah Personil Perjalanan dinas dalam 1 wilayah guna mencegah penularan Covid-19 yang mengakibatkan penurunan realisasi Perjalan Dinas pada Bawaslu Prov Jatim dan Bawaslu Kab/Kota;
3. Penyesuaian sistem jam kerja pada Lingkungan Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Kab/Kota WFH dan WFO yang mengakibatkan penurunan belanja keperluan perkantoran;
4. Adanya Pengurangan Pagu dari Bawaslu RI guna dialihkan untuk Penanganan Pandemi Covid-19;
5. Adanya Penonaktifan jajaran Panwascam 2 bulan yang mengakibatkan pembayaran Honor berkurang.

**Tabel 8. Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2020 dan 2019**

URAIAN	31-Des-20	31-Des-19	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	28.232.012.631	32.686.502.809	(13,63)
Belanja Barang	325.238.065.858	458.167.402.895	(29,01)
Belanja Modal	386.655.330	1.054.133.236	(63,32)
<b>Jumlah</b>	<b>353.856.733.819</b>	<b>491.908.038.940</b>	<b>(28,06)</b>

### **B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp28.232.012.631,00** dan Rp32.686.502.809,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar **13,63%** dari Tahun 2019. Hal ini disebabkan :

1. Tidak adanya Pembayaran Uang Kehormatan THR di lingkungan Bawaslu Provinsi;
2. Tidak adanya Pembayaran THR untuk eselon II di lingkungan Bawaslu Provinsi;
3. Tidak adanya Pembayaran Tukin Ketiga belas di lingkungan Bawaslu Provinsi.

**Tabel 9. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2020 dan 2019**

NO	URAIAN	31-Des-20	31-Des-19	%
1	Belanja gaji dan Tunjangan PNS	1.119.648.906	750.953.421	49,10
2	Belanja gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	26.129.339.900	30.922.577.100	(15,50)
3	Belanja Lembur	40.203.000	56.189.650	(28,45)
4	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	942.827.248	957.153.838	(1,50)
<b>Jumlah Belanja kotor</b>		<b>28.232.019.054</b>	<b>32.686.874.009</b>	<b>(13,63)</b>
5	Pengembalian Belanja Pegawai	6.423	371.200	-98,27
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>28.232.012.631</b>	<b>32.686.502.809</b>	<b>(13,63)</b>

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2020 sebesar Rp28.232.012.631,00 seluruhnya berasal dari sumber dana rupiah murni yang dipergunakan untuk:

1. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Bawaslu Provinsi Jawa Timur bulan Januari s.d Desember 2020;
2. Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara Bawaslu Provinsi Jawa Timur bulan Januari s.d Desember 2020, Gaji ketigabelas untuk jajaran Komisioner Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota dan THR untuk Jajaran Komisioner Bawaslu Kab/Kota;
3. Belanja Lembur PNS Bawaslu Provinsi Jawa Timur bulan Januari s.d Desember 2020;
4. Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito PNS Bawaslu Provinsi Jawa Timur bulan Januari s.d Desember 2020.

Dalam Belanja Pegawai per 31 Desember 2020 terdapat Pengembalian Belanja Pegawai dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 9.1.5 Rincian Pengembalian Belanja Pegawai (Belanja Gaji dan Tunjangan PNS)  
Periode 31 Desember 2020**

NAMA WAJIB BAYAR / SETOR	NTB/NTP	NTPN	KODE AKUN	SETORAN PER AKUN (Rp)
Pembayaran belanja pegawai untuk kekurangan gaji pegawai bulan Maret s .d Mei 2020	200311304010526	200311304010526	511119	117
Pembayaran belanja pegawai untuk kekurangan gaji pegawai bulan Oktober s.d November 2020 1 pegawai/4 jiwa	200311304024831	200311304024831	511119	6
<b>TOTAL</b>				<b>123</b>

**Tabel 9.2.5 Rincian Pengembalian Belanja Pegawai (Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara)  
Periode 31 Desember 2020**

NAMA WAJIB BAYAR / SETOR	NTB/NTP	NTPN	KODE AKUN	SETORAN PER AKUN (Rp)
Pengembalian kelebihan pembayaran uang kehormatan komisioner bulan januari 2020	929895503999	908813CIEESBPCOD	511332	900
Pengembalian kelebihan pembayaran uang kehormatan komisioner bulan februari 2020	929992504015	257947QLTJO9QD86	511332	900
Pengembalian kelebihan pembayaran uang kehormatan komisioner bulan Januari-maret tuban 2020	962675653205	45BFB55DE4P6J6C3	511332	4.500
<b>TOTAL</b>				<b>6.300</b>

Bukti setor telah kami lampirkan pada lampiran laporan keuangan periode 31 Desember 2020, pada **Lampiran I**.

## B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp325.238.065.858,00** dan Rp458.167.402.895,00. Realisasi Belanja Barang TA 2020 mengalami penurunan **29,01%** dari Realisasi Belanja Barang TA 2019. Hal ini antara lain disebabkan :

1. Penonaktifan Panwaslu Kecamatan selama 2 Bulan dikarenakan Pandemi yang mengakibatkan berkurangnya realisasi pada Akun Honorarium;
2. Tidak diperkenalkannya kegiatan tatap muka pada Akun Paket Meeting guna mencegah penularan Covid-19.

**Tabel 10. Perbandingan Realisasi Belanja Barang Periode 31 Desember 2020**

No	URAIAN	31-Des-20	31-Des-19	%
1	Belanja Barang Operasional	175.511.572.976	193.759.691.579	(9,42)
2	Belanja Barang Non Operasional	48.097.418.766	104.475.075.191	(53,96)
3	Belanja Barang Persediaan	1.203.218.285	64.185.878	1.774,58
4	Belanja Jasa	27.389.005.642	31.308.610.907	(12,52)
5	Belanja Pemeliharaan	5.498.912.178	4.833.703.139	13,76
6	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	67.645.467.230	124.167.878.226	(45,52)
	<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>325.345.595.077</b>	<b>458.609.144.920</b>	<b>(29,06)</b>
7	Pengembalian Belanja	107.529.219	441.742.025	(75,66)
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>325.238.065.858</b>	<b>458.167.402.895</b>	<b>(29,01)</b>

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2020 sebesar Rp325.238.065.858,00 berasal dari sumber dana **rupiah murni** sebesar Rp72.345.196.556,00 dan **hibah** sebesar Rp252.892.869.302,00. Seperti tabel yang tergambar dibawah ini:

**Tabel 10.1 Rincian Realisasi Belanja Barang APBN Periode 31 Desember 2020**

No	URAIAN	31-Des-20
1	Belanja Barang Operasional	41.893.430.680
2	Belanja Barang Non Operasional	1.793.885.381
3	Belanja Barang Persediaan	1.202.018.285
4	Belanja Jasa	7.521.238.098
5	Belanja Pemeliharaan	3.797.395.035
6	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	16.244.758.296
	<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>72.452.725.775</b>
7	Pengembalian Belanja	107.529.219
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>72.345.196.556</b>

Dana **rupiah murni** dipergunakan untuk tingkat Bawaslu Provinsi dengan rincian Kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
2. Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan BMN
3. Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan
4. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program
5. Pengawasan Pemilu Partisipatif
6. Pembinaan/ Penyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan Pemilu/ Pemilihan
7. Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu/ Pemilihan
8. Fasilitasi, Koordinasi, Dan Pelaporan Bawaslu Provinsi
9. Evaluasi Pengawasan Pemilu/ Pemilihan
10. Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting
11. Pembinaan/ Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran
12. Pembinaan/ Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/ Pemilihan
13. Fasilitasi Sentra Gakkumdu
14. Advokasi Pelanggaran dan Pidana Pemilu/ Pemilihan

15. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum
16. Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan
17. Advokasi Pelanggaran dan Pidana Pemilu/Pemilihan
18. Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi
19. Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik
20. Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah
21. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi
22. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran
23. Gaji dan Tunjangan
24. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Dana **rupiah murni** dipergunakan untuk tingkat Bawaslu Kab/Kota dengan rincian Kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
2. Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan BMN
3. Manajemen SDM Pengawas dan Kesekretariatan
4. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program
5. Pengawasan Pemilu Partisipatif
6. Pembinaan/ Penyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan Pemilu/Pemilihan
7. Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu/Pemilihan
8. Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota
9. Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran
10. Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan
11. Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi
12. Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik
13. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi
14. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran
15. Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan
16. Gaji dan Tunjangan
17. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

**Tabel 10.2 Rincian Realisasi Belanja Barang APBD Periode 31 Desember 2020**

No	URAIAN	31-Des-20
1	Belanja Barang Operasional	133.618.142.296
2	Belanja Barang Non Operasional	46.303.533.385
3	Belanja Barang Persediaan	1.200.000
4	Belanja Jasa	19.867.767.544
5	Belanja Pemeliharaan	1.701.517.143
6	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	51.400.708.934
	<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>252.892.869.302</b>
7	Pengembalian Belanja	
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>252.892.869.302</b>

Sedangkan untuk sumber **dana hibah** yang terdapat pada 19 Bawaslu Kab/Kota yang melaksanakan Pilkada rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah
2. Honorarium Kesekretariatan
3. Kelompok Kerja Pengawasan
4. Honorarium Pengelola Keuangan dan Pejabat Pengadaan
5. Fasilitasi Revisi Anggaran/NPHD
6. Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor
7. Sewa Kendaraan Operasional dan Kendaraan Lainnya
8. Pemeliharaan Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor
9. Pemeliharaan/ BBM Kendaraan Operasional

10. Pelayanan Administrasi Perkantoran
11. Pembentukan Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS
12. Pelantikan & Bimtek/Pelatihan Pengawas Pemilu
13. Advokasi dan Pendampingan Hukum
14. Sosialisasi Pengawasan Pemilu
15. Rakor/Pelatihan dalam Rangka Pengawasan Pemilu Partisipatif
16. Musyawarah Penyelesaian Sengketa
17. Penindakan Pelanggaran Administrasi, Etik dan Peraturan Perundang-undangan Lainnya
18. Kegiatan Sentra Gakkumdu
19. Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan
20. Koordinasi dengan Stakeholder
21. Perjalanan Dinas/ Transport dalam rangka Konsultasi/ Undangan/ Pengawasan/ Fasilitas Pendampingan Hukum/ Supervisi/ Panggilan Sidang Kode Etik.

Adapun rincian Pengembalian Belanja Barang yang bersumber dana rupiah murni yang telah kami lampirkan pada **Lampiran I** sebagai berikut:

**Tabel 11. Rincian Pengembalian Belanja Barang Periode 31 Desember 2020**

No	URAIAN	31-Des-20
1	Belanja Barang Operasional	25.000
2	Belanja Barang Non Operasional	41.691.774
3	Belanja Jasa	5.345.000
4	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	60.467.445
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>107.529.219</b>

**Tabel 11.1 Rincian Pengembalian Belanja Barang (Belanja Barang Operasional) Periode 31 Desember 2020**

No.	No. NTB	No. NTPN	TGL.DOK	AKUN	Rupiah
1	201223278192	1D8671JNEQFL2999	23/12/2020	521111	Rp 25.000
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp 25.000</b>

**Tabel 11.2 Rincian Pengembalian Belanja Barang (Belanja Barang Non Operasional) Periode 31 Desember 2020**

No.	No. NTB	No. NTPN	TGL.DOK	AKUN	Rupiah
1	201229558782	0C16C7QLTKGGQT6G	29/12/2020	521211	Rp 166.774
2	200915052213	A95980N9UVK3Q0PA	15/09/2020	521219	Rp 22.850.000
3	200915052336	AC2546U8DPKQL17T	15/09/2020	521219	Rp 3.500.000
4	201204124216	26A060N9UVSJTCE	04/12/2020	521219	Rp 15.175.000
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp 41.691.774</b>

**Tabel 11.3 Rincian Pengembalian Belanja Barang (Belanja Jasa) Periode 31 Desember 2020**

No.	No. NTB	No. NTPN	TGL.DOK	AKUN	Rupiah
1	200205930363	5461D61QTUD87ODA	05/02/2020	522151	Rp 900.000
2	200730838614	2582D7QLTK1MEOF1	30/07/2020	522151	Rp 1.710.000
3	200730839585	0DEF16U8DPFA1PO5	30/07/2020	522151	Rp 1.710.000
4	000000579481	28B8055DE4J4H2O5	19/10/2020	522151	Rp 125.000
5	201231795444	C487C1JNEQFT41RB	31/12/2020	522151	Rp 900.000
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp 5.345.000</b>

**Tabel 11.4 Rincian Pengembalian Belanja Barang (Belanja Perjalanan Dalam Negeri)  
Periode 31 Desember 2020**

No.	No. NTB	No. NTPN	TGL.DOK	AKUN	Rupiah
1	256184	8C0763CIEEJVPV46H	28/01/2020	524111	Rp 48.325
2	000000047259	16D588N3DE4FNASP	07/02/2020	524111	Rp 1.504.410
3	200219556221	B2AD00N9UUV9DP50	19/02/2020	524111	Rp 165.300
4	485297	4359C3CIEEMGOUA9	26/02/2020	524111	Rp 1.206.400
5	495122	29AA67QLTJIM02F8	26/02/2020	524111	Rp 1.072.000
6	503796	5780E48VU994C1JK	26/02/2020	524111	Rp 1.072.000
7	200602746280	87B4D6U8DPBG497V	02/06/2020	524111	Rp 23.097.542
8	200701175175	027A91JNEQ03URPT	01/07/2020	524111	Rp 309.700
9	2589561818	7555C0N9UVDRJVCS	07/07/2020	524111	Rp 364.900
10	74392	D97A96U8DPEIETAR	07/07/2020	524111	Rp 108.237
11	73153	E5B186U8DPEIETO9	07/07/2020	524111	Rp 123.915
12	3984	2CB9155DE49PKV15	07/07/2020	524111	Rp 37.268
13	126062	6E37561QTUSE87GI	14/07/2020	524111	Rp 1.000
14	200715024386	A57560N9UVE4RH50	15/07/2020	524111	Rp 348.857
15	718235	626553CIEF5C4GDN	17/07/2020	524111	Rp 420.275
16	FT20202MLW3T	DEB420N9UVE9SJKO	20/07/2020	524111	Rp 128.222
17	200730838780	62FE23CIEF5ODOB1	30/07/2020	524111	Rp 4.532.500
18	484743	9FD447QLTK3S5KVO	05/08/2020	524111	Rp 2.266.300
19	FT20252RFLCY	F75981JNEQ696RGV	08/09/2020	524111	Rp 49.168
20	200915052158	F3EFD61QTV2E80I0	15/09/2020	524111	Rp 2.369.756
21	323355	F2F422G4UKP27A5K	21/09/2020	524111	Rp 66.878
22	201006079026	29D371JNEQ6UGO8N	06/10/2020	524111	Rp 389.436
23	201023971410	A9E287QLTKACT8DI	23/10/2020	524111	Rp 52.100
24	364236926347	2854855DE4M1HFC9	16/11/2020	524111	Rp 82.894
25	201117153422	FDC388N3DEVJ6HG9	17/11/2020	524111	Rp 1.000
26	201117154319	FDC388N3DEVJ6HG9	17/11/2020	524111	Rp 32.340
27	201204124316	3EBD57QLTKFN5BVQ	04/12/2020	524111	Rp 6.415.200
28	201204124368	46AE68N3DF23ID4D	04/12/2020	524111	Rp 5.966.027
29	201217900023	7804855DE4P1GQ3F	17/12/2020	524111	Rp 171
30	201223000061	9FD782G4UL1T9SG2	23/12/2020	524111	Rp 100.000
31	201229527742	265DB2G4UL21GAA6	29/12/2020	524111	Rp 40.034
32	201229558901	6ADE048VUA6V6S9U	29/12/2020	524111	Rp 86.579
33	201229558998	3AE5C1JNEQFPVR59	29/12/2020	524111	Rp 217.200
34	201229559086	BCE4D7QLTKGGQRR2	29/12/2020	524111	Rp 186.309
35	201216786802	986216U8DPTO5RLJ	16/12/2020	524111	Rp 68.400
36	201216786959	263302G4UL1Q4R6O	16/12/2020	524111	Rp 50.400
37	201216787100	8AB9A8N3DF2H1KRB	16/12/2020	524111	Rp 260.400
38	201216787161	B807A6U8DPTO5Q1N	16/12/2020	524111	Rp 1.000.000
39	201230684025	31E1761QTVBP4ODM	30/12/2020	524111	Rp 2
40	201231795266	3BAF955DE4PEO1K9	31/12/2020	524111	Rp 96.000
41	200915052213	A95980N9UVK3Q0PA	15/09/2020	524113	Rp 3.900.000
42	200924513850	A9E918N3DEPRD4BT	24/09/2020	524113	Rp 100.000
43	200205930363	5461D61QTUD87ODA	05/02/2020	524114	Rp 520.000
44	1660000098	140F58N3DEPEGM87	10/09/2020	524114	Rp 195.000
45	200924513762	38AFB7QLTK7EVURK	24/09/2020	524114	Rp 1.000.000
46	948355839249	0726F3CIEFGRF0H9	05/11/2020	524114	Rp 100.000
47	948356839250	BBE9C7QLTKCPG0GQ	05/11/2020	524114	Rp 100.000
48	200219555984	764BB2G4UK4378VM	19/02/2020	524119	Rp 215.000
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp 60.467.445</b>

## B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp386.655.330,00** dan Rp1.054.133.236,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada Periode 31 Desember 2020 mengalami Penurunan sebesar **63,32%** dibandingkan 2019 disebabkan oleh Pengurangan pagu belanja modal untuk dialihkan pada belanja penanganan pandemi covid-19 dan Pemenuhan kebutuhan untuk satker baru telah dilaksanakan pada tahun 2019.

**Tabel 12. Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2020 dan 2019**

No	URAIAN	31-Des-20	31-Des-19	NAIK (TURUN) %
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	337.655.330	1.045.558.236	(67,71)
2	Belanja Modal Lainnya	49.000.000	8.575.000	471,43
	<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>386.655.330</b>	<b>1.054.133.236</b>	<b>(63,32)</b>
3	Pengembalian	-	-	-
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>386.655.330</b>	<b>1.054.133.236</b>	<b>(63,32)</b>

### B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp337.655.330,00** mengalami penurunan sebesar **67,71%** bila dibandingkan dengan realisasi 2019 sebesar Rp1.045.558.236,00. Hal ini disebabkan oleh Pengurangan pagu belanja modal untuk dialihkan pada belanja penanganan pandemi covid-19 dan Pemenuhan kebutuhan untuk satker baru telah dilaksanakan pada tahun 2019.

**Tabel 12.1 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2020 dan 2019**

No	URAIAN	31-Des-20	31-Des-19	NAIK (TURUN) %
1	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	201.529.600	-	100,00
2	Alat Kantor	12.962.850	29.838.091	(56,56)
3	Alat Rumah Tangga	40.939.200	744.482.095	(94,50)
4	Alat Studio	8.365.280	36.841.500	(77,29)
5	Alat Kedokteran	73.858.400	-	100,00
6	Komputer Unit	-	156.736.800	(100,00)
7	Peralatan Komputer	-	77.659.750	(100,00)
	<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>337.655.330</b>	<b>1.045.558.236</b>	<b>(67,71)</b>
8	Pengembalian	-	-	0,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>337.655.330</b>	<b>1.045.558.236</b>	<b>(67,71)</b>

#### 1. Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi

- a. Bawaslu Kota Malang Renovasi Kantor Lantai 2 Rp135.779.600,00;
- b. Bawaslu Kab. Sumenep Renovasi Kantor Sekat Ruangan Rp65.750.000,00.

#### 2. Alat Kantor

- a. Bawaslu Kota Pasuruan Rak Kayu 1 Unit Rp4.500.000,00;
- b. Bawaslu Kab. Sidoarjo LCD Proyektor 1 Unit Rp8.462.850,00.

#### 3. Alat Rumah Tangga

- a. Bawaslu Kab. Kediri Meja Kerja Kayu 2 Unit Rp2.999.000,00;
- b. Provinsi Meja Kerja Kayu 1 Unit Rp4.995.200,00;
- c. Bawaslu Kab. Kediri Kursi Besi 12 Unit Rp13.988.000,00;
- d. Bawaslu Kab. Kediri Sice 1 Unit Rp13.458.000,00;
- e. Bawaslu Kab. Kediri Meja Rapat 1 Unit Rp5.499.000,00.

#### 4. Alat Studio

- a. Bawaslu Kab. Sidoarjo Kamera Digital 1 Unit Rp8.365.280,00.

## 5. Alat Kedokteran

- a. Provinsi Thermogun 1 Unit Rp3.654.100,00;
- b. Provinsi Bilik Disinfektan 1 Unit Rp7.247.500,00;
- c. Kab. Madiun Thermogun 1 Unit Rp3.500.000,00;
- d. Kab. Nganjuk Thermogun 1 Unit Rp4.500.000,00;
- e. Kota Mojokerto Thermogun 1 Unit Rp1.250.000,00;
- f. Kab. Gresik Thermogun 1 Unit Rp4.500.000,00;
- g. Kota Blitar Thermogun 1 Unit Rp2.750.000,00;
- h. Kota Madiun Thermogun 1 Unit Rp1.600.000,00;
- i. Kab. Tuban Thermogun 2 Unit Rp2.720.000,00;
- j. Kab. Ponorogo Thermogun 1 Unit Rp1.200.000,00;
- k. Kota Malang Thermogun 1 Unit Rp4.460.000,00;
- l. Kab. Bondowoso Thermogun 1 Unit Rp1.700.000,00;
- m. Kab. Jember Thermogun 1 Unit Rp2.230.000,00;
- n. Kota Batu Thermogun 1 Unit Rp1.578.500,00;
- o. Kab. Jombang Thermogun 1 Unit Rp2.300.000,00;
- p. Kab. Sampang Thermogun 1 Unit Rp3.500.000,00;
- q. Kab. Bangkalan Thermogun 2 Unit Rp4.500.000,00;
- r. Kab. Probolinggo Thermogun 1 Unit Rp1.300.000,00;
- s. Kab. Lamongan Thermogun 3 Unit Rp3.600.000,00;
- t. Kab. Malang Thermogun 1 Unit Rp1.500.000,00;
- u. Kab. Lumajang Thermogun 1 Unit Rp1.750.000,00;
- v. Kab. Bojonegoro Thermogun 2 Unit Rp2.750.000,00;
- w. Kab. Banyuwangi Thermogun 1 Unit Rp1.500.000,00;
- x. Kab. Jember Thermogun 1 Unit Rp1.500.000,00;
- y. Kab. Situbondo Thermogun 1 Unit Rp2.698.300,00;
- z. Provinsi Thermogun 1 Unit Rp1.320.000,00;
- aa. Kota Surabaya Thermogun 1 Unit Rp2.750.000,00.

Belanja modal untuk Alat Kedokteran sebesar Rp73.858.400,00 merupakan pembelian untuk penanganan covid yang seharusnya menggunakan Akun Covid tetapi masih menggunakan akun biasa

### B.5.2 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp49.000.000,00** dan Rp8.575.000,00 mengalami kenaikan sebesar 100,00 % dibandingkan Realisasi TA 2019. Hal ini disebabkan karena adanya Pengembangan Website Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Tabel 12.2 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN	31-Des-20	31-Des-19	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Lainnya	49.000.000	8.575.000	100,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>49.000.000</b>	<b>8.575.000</b>	<b>100,00</b>
Pengembalian	-	-	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>49.000.000</b>	<b>8.575.000</b>	<b>100,00</b>

## C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

### C.1 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar **Rp48.435.414.317,00** dan Rp14.848.894.884,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu yang bukan berasal dari UP/TUP.

Tabel 13. Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas 31 Desember 2020 dan 2019

No	URAIAN	31-Des-20	31-Des-19
1	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	33.437.159	123.802.746
2	Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	48.401.977.158	14.725.092.138
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>48.435.414.317</b>	<b>14.848.894.884</b>

1.1 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar **Rp33.437.159,00** merupakan nilai Pajak yang 2020 yang belum disetorkan, Jasa Giro 2020 yang belum disetorkan dan Belanja Hibah yang sudah disahkan akan tetapi belum diambil uangnya pada Rekening Hibah.

Rincian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2020 dapat kami sampaikan sebagai berikut:

Tabel 13.1 Rincian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2020

No	URAIAN	Rp
1	Pajak APBN 2020 Bawaslu Kab. Pasuruan	2.133.650
2	Pajak APBD 2020 Bawaslu Kab. Blitar	10.797.980
3	Pajak APBD 2020 Bawaslu Kab. Jember	18.281.979
4	Jasa Giro APBD 2020 Bawaslu Kab. Ponorogo	2.188.345
5	Jasa Giro APBD 2020 Bawaslu Kota Blitar	35.205
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>33.437.159</b>

Dapat kami sampaikan terkait rincian diatas sebagai berikut:

1. Pajak Terhutang untuk Bawaslu Kab. Pasuruan, Blitar dan Jember telah disetorkan ke Kas Negara;
2. Jasa Giro terhutang untuk Bawaslu Kab. Ponorogo telah disetorkan ke Kas Pemda dengan STS No 001/686349/STS/2021 dan Jasa Giro Bawaslu Kota Blitar telah disetorkan ke Kas Negara dengan No NTPN 57DE948VUIG1UJLI tanggal 22 Januari 2021;

Sebagai data dukung untuk keterangan diatas telah kami lampirkan bukti setor pada **Lampiran 1**.

1.2 Sementara untuk Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah sebesar **Rp48.401.977.158,00** merupakan saldo akhir dana hibah tahun 2020 yang akan dipergunakan untuk kegiatan lanjutan pelaksanaan pengawasan Pemilihan Bupati dan Walikota pada tahun 2020 secara serentak di sebanyak 19 daerah dengan rincian, 16 Daerah Pemilihan Bupati dan 3 Daerah Pemilihan Walikota yang terdiri dari:

**Tabel 13.2 Rincian Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah 31 Desember 2020**

No	URAIAN	Tunai	Bank	UMK	TP-TGR
1	BPP KABUPATEN PACITAN		3.558.939.444		
2	BPP KABUPATEN PONOROGO		1.025.463.882		
3	BPP KABUPATEN TRENGGALEK		894.954.460		
4	BPP KABUPATEN BLITAR		1.636.886.993		
5	BPP KABUPATEN KEDIRI		1.694.671.961		
6	BPP KABUPATEN MALANG		3.164.767.940		
7	BPP KABUPATEN JEMBER	67.319.520	2.516.874.498		
8	BPP KABUPATEN BANYUWANGI		2.098.830.549		
9	BPP KABUPATEN SITUBONDO	88.212.112	2.890.102.938		(87.929.778)
10	BPP KABUPATEN SIDOARJO		2.983.446.356		
11	BPP KABUPATEN MOJOKERTO		501.214.730		
12	BPP KABUPATEN NGAWI		1.147.374.302		
13	BPP KABUPATEN TUBAN		2.690.350.504		
14	BPP KABUPATEN LAMONGAN		2.861.878.042		
15	BPP KABUPATEN GRESIK		887.361.025		
16	BPP KABUPATEN SUMENEP		6.913.454.974		
17	BPP KOTA BLITAR	57.243	2.325.613.340	649.475	
18	BPP KOTA PASURUAN		2.486.925.275		
19	BPP KOTA SURABAYA		6.054.557.373		
	<b>Total</b>	<b>155.588.875</b>	<b>48.333.668.586</b>	<b>649.475</b>	<b>(87.929.778)</b>
	<b>Total Kas</b>				<b>48.401.977.158</b>

Dapat kami sampaikan bahwa pada pengelolaan Hibah Pilkada 2020 terdapat Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (**TP-TGR**) pada Bawaslu Kabupaten Situbondo sesuai Surat Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia sebesar **Rp87.929.778,00**.

### C.3 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar **Rp10.397.403,00** dan Rp2.870.863.132,00. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 14. Perbandingan Persediaan 31 Desember 2020 dan 2019**

No	URAIAN	31-Des-20	31-Des-19
1	Barang Konsumsi	10.397.403	2.568.010
2	Sisa Buku Saksi Parpol se-Jawa Timur	-	2.868.295.122
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>10.397.403</b>	<b>2.870.863.132</b>

Persediaan tersebut di atas dalam Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Berikut hasil mutasi persediaan Tahun 2020

<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>2.870.863.132</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Pembelian	1.203.218.285
Hibah (Masuk)	4.084.031.628
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	3.119.398.751
<b>Mutasi kurang:</b>	
Beban Persediaan konsumsi	(6.514.948.894)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	(43.200.000)
Beban Persediaan Lainnya	(1.723.130.000)
Beban Persediaan Rusak/Usang	(2.868.295.122)
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	(117.540.377)
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>10.397.403</b>

Terkait Penjelasan Kondisi Persediaan akan kami Lampirkan BA Stock Opname pada Lampiran Laporan BMN.

#### C.4 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin 31 Desember 2020 dan 2019 adalah **Rp17.371.317.012,00** dan Rp16.626.118.463,00. Adapun saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 15. Perbandingan Peralatan dan Mesin 31 Desember 2020 dan 2019**

No	URAIAN	31-Des-20	31-Des-19
1	Alat Bantu	40.411.800	40.411.800
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	4.202.160.000	4.202.160.000
3	Alat Kantor	1.563.627.466	1.538.869.616
4	Alat Rumah Tangga	5.630.541.293	5.463.848.093
5	Alat Studio	273.657.054	242.892.774
6	Alat Komunikasi	57.080.500	15.086.500
7	Alat Kedokteran	163.858.400	-
8	Komputer Unit	4.745.826.549	4.629.090.730
9	Peralatan Komputer	538.175.950	493.758.950
10	Alat Pelindung	1.048.000	-
11	Peralatan Olah Raga	154.930.000	-
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>17.371.317.012</b>	<b>16.626.118.463</b>

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019</b>	<b>16.626.118.463</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Pembelian	136.125.730
Perolehan Lainnya	530.894.819
Hibah Masuk	130.702.879
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Ektrakomptable	52.524.879
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>17.371.317.012</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	10.774.729.051
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2020</b>	<b>6.596.587.961</b>

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

#### **Pembelian**

##### **1. Alat Kantor**

- a. Bawaslu Kota Pasuruan Rak Kayu 1 Unit Rp4.500.000,00;

b. Bawaslu Kab. Sidoarjo LCD Proyektor 1 Unit Rp8.462.850,00.

## **2. Alat Rumah Tangga**

- a. Bawaslu Kab. Kediri Meja Kerja Kayu 2 Unit Rp2.999.000,00;
- b. Provinsi Meja Kerja Kayu 1 Unit Rp4.995.200,00;
- c. Bawaslu Kab. Kediri Kursi Besi 12 Unit Rp13.988.000,00;
- d. Bawaslu Kab. Kediri Sice 1 Unit Rp13.458.000,00;
- e. Bawaslu Kab. Kediri Meja Rapat 1 Unit Rp5.499.000,00.

## **3. Alat Studio**

- a. Bawaslu Kab. Sidoarjo Kamera Digital 1 Unit Rp8.365.280,00.

## **4. Alat Kedokteran**

- a. Provinsi Thermogun 1 Unit Rp3.654.100,00;
- b. Provinsi Bilik Disinfektan 1 Unit Rp7.247.500,00;
- c. Kab. Madiun Thermogun 1 Unit Rp3.500.000,00;
- d. Kab. Nganjuk Thermogun 1 Unit Rp4.500.000,00;
- e. Kota Mojokerto Thermogun 1 Unit Rp1.250.000,00;
- f. Kab. Gresik Thermogun 1 Unit Rp4.500.000,00;
- g. Kota Blitar Thermogun 1 Unit Rp2.750.000,00;
- h. Kota Madiun Thermogun 1 Unit Rp1.600.000,00;
- i. Kab. Tuban Thermogun 2 Unit Rp2.720.000,00;
- j. Kab. Ponorogo Thermogun 1 Unit Rp1.200.000,00;
- k. Kota Malang Thermogun 1 Unit Rp4.460.000,00;
- l. Kab. Bondowoso Thermogun 1 Unit Rp1.700.000,00;
- m. Kab. Jember Thermogun 1 Unit Rp2.230.000,00;
- n. Kota Batu Thermogun 1 Unit Rp1.578.500,00;
- o. Kab. Jombang Thermogun 1 Unit Rp2.300.000,00;
- p. Kab. Sampang Thermogun 1 Unit Rp3.500.000,00;
- q. Kab. Bangkalan Thermogun 2 Unit Rp4.500.000,00;
- r. Kab. Probolinggo Thermogun 1 Unit Rp1.300.000,00;
- s. Kab. Lamongan Thermogun 3 Unit Rp3.600.000,00;
- t. Kab. Malang Thermogun 1 Unit Rp1.500.000,00;
- u. Kab. Lumajang Thermogun 1 Unit Rp1.750.000,00;
- v. Kab. Bojonegoro Thermogun 2 Unit Rp2.750.000,00;
- w. Kab. Banyuwangi Thermogun 1 Unit Rp1.500.000,00;
- x. Kab. Jember Thermogun 1 Unit Rp1.500.000,00;
- y. Kab. Situbondo Thermogun 1 Unit Rp2.698.300,00;
- z. Provinsi Thermogun 1 Unit Rp1.320.000,00;
- aa. Kota Surabaya Thermogun 1 Unit Rp2.750.000,00.

## **Perolehan Lainnya (Reward Bank)**

Perolehan lainnya pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 berasal dari Reward Bank hasil Beauty Contes bank. Dapat kami rincikan seperti tabel dibawah ini:

**Tabel 15.1 Rincian Perolehan Lainnya 2020**

No	Bawaslu Kab/Kota	Nilai (Rp)	Intrakomptable (Rp)	Ekstrakomptable (Rp)
1	Kota Pasuruan	8.100.000	8.100.000	-
2	Kab. Jember	120.178.000	120.178.000	-
3	Kab. Situbondo	39.615.000	38.900.000	715.000
4	Kab. Pacitan	29.245.000	29.245.000	-
5	Kab. Blitar	55.752.000	47.502.000	8.250.000
6	Kota Blitar	20.674.000	19.699.000	975.000
7	Kab. Malang	96.810.819	95.253.819	1.557.000
8	Kab. Gresik	9.995.000	9.995.000	-
9	Kab. Trenggalek	13.800.000	13.800.000	-
10	Kab. Tuban	45.925.000	45.600.000	325.000
11	Kab. Ponorogo	35.800.000	35.800.000	-
12	Kab. Mojokerto	55.000.000	55.000.000	-
<b>JUMLAH</b>		<b>530.894.819</b>	<b>519.072.819</b>	<b>11.822.000</b>

Untuk penjelasan lebih detil terkait jenis barang reward terlampir pada **Lampiran Laporan BMN**

### **Hibah Barang Masuk**

Hibah Masuk pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 berasal dari Pemberian Pemda berupa alat-alat APD yang digunakan pada Tahapan-Tahapan Pemilu. Dapat kami rincikan seperti tabel dibawah ini:

**Tabel 15.2 Rincian Hibah Barang Masuk 2020**

No	Bawaslu Kab/Kota	Nilai (Rp)	Intrakomptable (Rp)	Ekstrakomptable (Rp)
1	Kab. Mojokerto	90.000.000	90.000.000	-
2	Kab. Ngawi	19.002.879		19.002.879
3	Kab. Jember	21.700.000		21.700.000
<b>JUMLAH</b>		<b>130.702.879</b>	<b>90.000.000</b>	<b>40.702.879</b>

*Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran BMN*

### **C.5 Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp9.375.000,00** dan Rp9.375.000,00. Tidak terdapat mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan. Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019</b>	<b>9.375.000</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
<b>Mutasi Kurang:</b>	
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>9.375.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	(9.375.000)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2020</b>	<b>-</b>

*Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran BMN*

### **C.6 Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah **Rp1.374.581.129,00** dan Rp1.173.051.529,00. Adapun saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 16. Perbandingan Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2020 dan 2019**

No	URAIAN	31-Des-20	31-Des-19
1	Aset Tetap Dalam Renovasi	1.374.581.129	1.173.051.529
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.374.581.129</b>	<b>1.173.051.529</b>

Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019</b>	<b>1.173.051.529</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Aset tetap dalam renovasi	201.529.600
<b>Mutasi Kurang:</b>	
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>1.374.581.129</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2020</b>	<b>1.374.581.129</b>

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Dalam hal ini aset tetap lainnya yang dimaksud adalah berupa :

1. Renovasi ruang gakkumdu;
2. Renovasi ruang arsip;
3. Renovasi pagar depan kantor;
4. Renovasi pos satpam;
5. Renovasi ruang kasek;
6. Renovasi tampilan luar kantor;
7. Renovasi ruang media center;
8. Renovasi ruang keuangan menjadi ruang arsip;
9. Renovasi ruang 3 komisioner dan renovasi 4 komisioner.

*Mutasi transaksi penambahan Aset Tetap Lainnya berupa:*

1. Renovasi Kantor Bawaslu Kota Malang;
2. Renovasi Kantor Bawaslu Kabupaten Sumenep.

*Rincian aset tetap Lainnya disajikan pada Lampiran BMN*

### C.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing **Rp10.789.604.051,00** dan Rp7.658.420.279,00.

**Tabel 17. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2020**

No	Jenis	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	17.371.317.012	(10.780.229.051)	6.591.087.961
2	Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.375.000	(9.375.000)	-
	<b>Jumlah</b>	<b>17.380.692.012</b>	<b>(10.789.604.051)</b>	<b>6.591.087.961</b>

### C.8 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur berupa website yang digunakan untuk menunjang operasional

kantor. Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah **Rp98.500.000,00** dan Rp49.500.000,00. terdapat mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan.

**Tabel 18. Perbandingan Aset Tak Berwujud 31 Desember 2020 dan 2019**

No	URAIAN	31-Des-20	31-Des-19
1	Software	98.500.000	49.500.000
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>98.500.000</b>	<b>49.500.000</b>

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai per 31 Desember 2019</b>	<b>49.500.000</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Pengembangan	49.000.000
<b>Mutasi Kurang:</b>	
<b>Saldo Nilai per 31 Desember 2020</b>	<b>98.500.000</b>
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2020	( 98.500.000)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2020</b>	<b>-</b>

*Mutasi transaksi penambahan Aset Tak Berwujud berupa:*

Pengembangan Website untuk Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang terdapat pada link : <http://jatim.bawaslu.go.id/> pengembangan berupa penambahan fitur untuk disabilitas salah satunya berupa adanya tombol “suara”. Selain itu terdapat juga Aplikasi Mobile dengan nama **Pusat Informasi Pilkada Jawa Timur** yang dapat di install melalui **Playstore** dengan link sebagai berikut : <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cahstudio.gowasludisabilitas>

### **C.9 Aset Lain-Lain**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah **Rp88.978.252,00** dan Rp1.048.474,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Selain itu pada akun aset lain-lain terdapat Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR). Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>1.048.474</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Aset Lain-Lain	87.929.778
<b>Mutasi kurang:</b>	
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>88.978.252</b>
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2020	(655.296)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2020</b>	<b>88.322.956</b>

Terdapat penambahan Aset Lain-Lain:

Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) di Bawaslu Kabupaten Situbondo pada pengelolaan dana hibah pilkada serentak 2020.

### **C.10 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapsitas atau

masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah **Rp99.155.296,00** dan Rp43.705.677,00.

**Tabel 19. Perbandingan Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Tahun 2020**

Jenis	31-Des-20	31-Des-19
Software	98.500.000	43.312.500
Aset tetap yang tidak digunakan	655.296	393.177
<b>Jumlah</b>	<b>99.155.296</b>	<b>43.705.677</b>

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 20. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
<b>Aset Tak Berwujud</b>			
Aset Tak Berwujud	98.500.000	( 98.500.000)	-
<b>Aset Lain-lain</b>			
Aset Lain-lain	88.978.252	( 655.296)	88.322.956
<b>Total</b>	<b>187.478.252</b>	<b>( 99.155.296)</b>	<b>88.322.956</b>

### C.11 Utang Kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar **Rp1.584.010.096,00** dan Rp12.576.735,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

**Tabel 21. Perbandingan Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun 2020**

No	Uraian	31-Des-20	31-Des-19
1	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	1.581.821.751	12.446.735
2	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	2.188.345	-
	<b>Total</b>	<b>1.584.010.096</b>	<b>12.446.735</b>

Utang kepada pihak ketiga periode 31 Desember 2020 dapat kami jelaskan sebagai berikut:

#### 1. Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar

- a. Pembayaran Listrik Rp39.600.216,00;
- b. Pembayaran Telpon Rp2.584.244,00;
- c. Pembayaran Air Rp3.813.125,00;
- d. Pembayaran Internet Rp25.562.215,00;
- e. Tunggakan Bawaslu Kota Blitar Rp73.001.000,00;
- f. Tunggakan Bawaslu Kota Surabaya Rp1.333.377.500,00;
- g. Tunggakan Bawaslu Kab Sidoarjo Rp103.883.451,00;

#### 2. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)

Nilai ini berasal dari Jasa Giro Hibah Bawaslu Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 yang belum disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah Ponorogo tahun 2020 tetapi telah disetorkan pada Tahun 2021 dengan STS No. STS No 001/686349/STS/2021 tanggal 15 Januari 2021.

### C.12 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar **Rp31.213.609,00** dan Rp122.257.058,00. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

**Tabel 22. Perbandingan Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2020**

No	Uraian	31-Des-20	31-Des-19
1	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran Yang Belum Disetor	31.213.609	122.257.058
	<b>Total</b>	<b>31.213.609</b>	<b>122.257.058</b>

Terkait tabel diatas dapat kami jelaskan berasal dari :

1. Pajak Apbn Bawaslu Kab. Pasuruan Rp2.133.650,00 telah disetorkan bulan Februari;
2. Pajak Hibah Bawaslu Kab. Blitar Rp10.797.980,00 telah disetorkan bulan Januari;
3. Pajak Hibah Bawaslu Kab. Jember Rp18.281.979,00 telah disetorkan bulan Januari.

### C.13 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp54.884.580.061,00** dan Rp38.961.411.733,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset sebesar Rp56.499.803.766,00 dan kewajiban sebesar Rp1.615.223.705,00. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

### D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar **Rp36.374.258,00** dan Rp60.831.564,00 terjadi penurunan sebesar **40,20%** dibandingkan Realisasi TA 2019. Pendapatan tersebut terdiri dari :

**Tabel 23. Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2020 dan 2019**

URAIAN	31-Des-20	31-Des-19	%
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	36.374.258	59.586.714	(38,96)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah		1.145.450	(100,00)
Pendapatan Anggaran Lain-lain		99.400	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>36.374.258</b>	<b>60.831.564</b>	<b>(40,20)</b>

**Tabel 24. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2020**

NAMA WAJIB BAYAR / SETOR	TANGGAL BUKU	NTB/NTP	NTPN	KODE AKUN	SETORAN PER AKUN (Rp)
Bawaslu Kab.Malang	31/01/2020	200131810699	A155A55DE30LUC4D	425764	1.808.719
KOTA BLITAR	07/02/2020	931496697182	092B36U8DOVMS5FR	425764	625.601
RPL 031 BAWASLU KAB BLITAR	17/02/2020	917590561958	864B70N9UUV55VRU	425764	576.502
BPP BAWASLU KAB BLITAR	11/03/2020	200311421542	DB5317QLTJL027PI	425764	7.976.463
bppbaswaslukotamadiun	16/03/2020	942696587106	535816U8DP2S45IV	425764	1.370
Bawaslu Kab.Malang	17/03/2020	200317682203	DCE7E6U8DP304VRP	425764	519.483
Bawaslu Kab.Malang	31/03/2020	200331069498	4DC0A7QLTJLPOD9U	425764	36.814
Bawaslu Kota Blitar	30/04/2020	946257367986	397A27QLTJOO3JC8	425764	624.494
BPP Bawaslu Kabupaten Bojonegoro	06/05/2020	964125048071	2509F6U8DP8KE9O9	425764	69.303
Bawaslu Kab.Malang	15/05/2020	200515233043	912710N9UV82L2RI	425764	145.671
Bawaslu Kab.Malang	12/06/2020	200612235698	6A9498N3DEGG3H6V	425764	296.062
Bendahara Pengeluaran	17/06/2020	200617467603	143FE61QTUPHSH0S	425764	6.500
Bawaslu Kab Malang	01/07/2020	200630111557	E339348VU9L5ADT8	425764	631.401
Bawaslu Kab.Malang	06/08/2020	200805055520	0298C55DE4CO3KOH	425764	3.977.573
Bawaslu Kab. Gresik	27/08/2020	200827097616	15F937QLTK4GJ916	425764	89.490
Bawaslu Kota Surabaya	23/11/2020	000013276708	E243C61QTV8K879U	425764	797.246
Bawaslu Kab.Malang	22/12/2020	201222149632	F61AC3CIEFKDODTH	425764	1.342.592
BPP Bawaslu Sumenep	29/12/2020	001823800091	D7CF961QTVB00SOC	425764	16.768.669
BP Bawaslu Jatim	30/12/2020	201230655055	5349D7QLTKGHUEMQ	425764	45.100
<b>TOTAL PENDAPATAN 2020</b>					<b>36.339.053</b>
Jurnal Jasa Giro 2020 Bawaslu Kota Blitar	22/01/2021	210122672685	57DE948VUIG1UJLI	425764	35.205
<b>TOTAL PENDAPATAN LO</b>					<b>36.374.258</b>

Terkait Pendapatan Negara Bukan Pajak Laporan Operasional pada Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) senilai Rp36.374.258,00 dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak Laporan Realisasi Anggaran pada Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) senilai Rp209.829.985,00 terdapat selisih senilai Rp173.455.727,00 terdiri dari:

1. Penyetoran Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) APBD Tahun 2019 yang telah disetorkan pada Tahun 2020 pada Kabupaten Gresik sebesar Rp118.215,00 Kabupaten Blitar sebesar Rp312.587,00; Kabupaten Malang sebesar Rp984.886,00;
2. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Kabupaten Pasuruan sebesar Rp5.000.000,00, Bawaslu Provinsi sebesar Rp200.000,00 dan Bawaslu Kab. Pamekasan sebesar Rp63.028.767,00;
3. Penerimaan Lelang buku saksi parpol sebesar Rp103.846.477,00; dikurangi
4. Jurnal Jasa Giro 2020 yang belum disetorkan ke Kas Negara tetapi telah disetorkan pada Tahun 2021 Bawaslu Kota Blitar sebesar Rp.35.205,00.

Tabel Mutasi pendapatan yang diperoleh sebagai berikut:

<b>Mutasi Tambah:</b>	
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) LRA	37.754.741
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	68.228.767
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	103.846.477
Jurnal Jasa Giro Tahun 2020 yang disetor 2021 Kota Blitar	35.205
<b>Jumlah Mutasi tambah</b>	<b>209.865.190</b>
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	68.228.767
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	1.415.688
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	103.846.477
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>173.490.932</b>
<b>Jumlah Pendapatan per 31 Desember 2020</b>	<b>36.374.258</b>

## D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp28.232.012.631,00** dan Rp32.686.502.809,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai Tahun 2020 terjadi penurunan sebesar **13,63%** dibandingkan dengan Tahun 2019 terjadi penurunan yang paling signifikan pada Akun "**Belanja Uang Lembur**" dikarenakan pada bulan Maret s.d Juni tahun 2020 telah terjadi perubahan sistem kerja yang mengharuskan pegawai bekerja dirumah. Terdapat juga kenaikan yang signifikan pada Akun "**Beban Tunjangan Struktural PNS**" dikarenakan pada bulan february tahun 2020 telah dilantik 4 Kepala Bagian dan 5 Kepala Subbagian. Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 25. Perbandingan Beban Pegawai 31 Desember TA 2020 dan 2019**

URAIAN	31-Des-20	31-Des-19	%
Beban Gaji Pokok PNS	652.195.540	473.539.640	37,73
Beban Pembulatan Gaji PNS	10.446	6.642	57,27
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	50.536.138	36.639.548	37,93
Beban Tunj. Anak PNS	15.035.252	11.747.138	27,99
Beban Tunj. Struktural PNS	133.690.000	17.820.000	650,22
Beban Tunj. PPh PNS	83.390.307	74.108.513	12,52
Beban Tunj. Beras PNS	40.193.100	32.371.740	24,16
Beban Uang Makan PNS	114.788.000	75.324.000	52,39
Beban Tunjangan Umum PNS	29.810.000	29.025.000	2,70
Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	26.129.333.600	30.922.577.100	(15,50)
Beban Uang Lembur	40.203.000	56.189.650	(28,45)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	942.827.248	957.153.838	(1,50)
<b>Jumlah</b>	<b>28.232.012.631</b>	<b>32.686.502.809</b>	<b>(13,63)</b>

## D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp8.222.928.894,00** dan Rp77.188.505,00. Beban Persediaan Tahun 2020 terjadi kenaikan sebesar **10.553,05%** dibandingkan dengan Tahun 2019. Beban

Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 26. Perbandingan Beban Persediaan 31 Desember 2020 dan 2019**

URAIAN	31-Des-20	31-Des-19	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	6.499.798.894	77.188.505	8.320,68
Beban Persediaan Lainnya	1.723.130.000	0	-
<b>Jumlah</b>	<b>8.222.928.894</b>	<b>77.188.505</b>	<b>10.553,05</b>

Pada Beban Persediaan Konsumsi pada tahun 2020 meningkat signifikan dikarenakan adanya Pembelian masker, Handsanitizer dan obat-obatan pada 38 Bawaslu Kab/Kota. Terkait realisasi belanja barang persediaan pada Laporan Realisasi Anggaran dan beban persediaan Laporan Operasional terdapat selisih, berikut hasil mutasi beban periode 31 Desember 2020.

<b>Mutasi Tambah:</b>	
<b>Saldo Awal</b>	
Barang Konsumsi	2.870.863.132
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	343.424.479
Belanja Barang Persediaan- Penanganan Pandemi Covid 19	859.793.806
Hibah (Masuk) Barang Konsumsi- Penanganan Pandemi Covid 19	4.084.031.628
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	3.118.548.751
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>11.276.661.796</b>
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	(117.540.377)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	(43.200.000)
Beban Persediaan yang berasal dari Belanja Bahan	(14.300.000)
Beban Persediaan Rusak/Usang	(2.868.295.122)
Barang Konsumsi	(10.397.403)
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>(3.053.732.902)</b>
<b>Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2020</b>	<b>8.222.928.894</b>

#### **D.4 Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp263.209.224.505,00** dan Rp332.923.185.640,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar **20,94%** dibandingkan dengan Tahun 2019 disebabkan oleh Pada Tahun Anggaran 2020 terdapat beberapa kebijakan dari Bawaslu RI sebagai Langkah-Langkah Pengalihan Anggaran guna Penanganan Pandemi Covid-19, antara lain:

1. Penonaktifan Jajaran Panwaslu Kecamatan selama 2 bulan yang mengakibatkan berkurangnya realisasi pada Honorarium;
2. Pengalihan Kegiatan yang awalnya kegiatan tatap muka beralih pada kegiatan daring yang mengakibatkan berkurangnya realisasi pada Paket Meeting dalam Kota, Luar Kota dan Honor Output Kegiatan;

3. Tidak diperkenalkannya Pembayaran Honorarium Narasumber dan Moderator untuk seluruh jajaran Bawaslu Provinsi, Kab/Kota dan Kecamatan serta Sekretariat Provinsi, Kab/Kota dan Kecamatan selama sasaran utama dan penyelenggaranya dari Bawaslu.

Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 27. Perbandingan Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2020 dan 2019**

URAIAN	31-Des-20	31-Des-19	%
Beban Keperluan Perkantoran	157.492.055.292	186.671.060.787	(15,63)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	19.379.800	-	100,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	3.247.916.600	4.072.675.900	(20,25)
Beban Barang Operasional Lainnya	730.453.082	2.805.871.392	(73,97)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	14.485.155.117	-	100,00
Beban Bahan	34.357.649.316	91.602.007.774	(62,49)
Beban Honor Output Kegiatan	13.741.370.000	5.502.717.500	149,72
Beban Barang Non Operasional Lainnya	161.799.976	4.492.569.795	(96,40)
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	10.000.000	-	100,00
Beban Langganan Listrik	969.668.711	961.879.604	0,81
Beban Langganan Telepon	1.383.710.845	168.903.236	719,23
Beban Langganan Air	111.784.574	172.925.866	(35,36)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	60.000.000	-	100,00
Beban Jasa Pos dan Giro	-	32.250.400	(100,00)
Beban Jasa Konsultan	111.568.622	211.414.600	(47,23)
Beban Sewa	23.412.591.713	25.642.965.227	(8,70)
Beban Jasa Profesi	5.184.270.000	5.633.295.000	(7,97)
Beban Jasa Lainnya	1.945.315.890	4.764.466.559	(59,17)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	5.532.704.288	-	100,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	251.830.679	188.182.000	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>263.209.224.505</b>	<b>332.923.185.640</b>	<b>(20,94)</b>

Terkait realisasi belanja barang dan jasa pada Laporan Realisasi Anggaran dan beban barang dan jasa pada Laporan Operasional terdapat selisih, berikut hasil mutasi beban barang dan jasa periode 31 Desember 2020.

<b>Mutasi Tambah:</b>	
Belanja barang dan jasa	250.765.929.810
Beban Aset ekstrakomtabel peralatan dan mesin	251.830.679
Penambahan Beban Sewa atas Sewa Dibayar Dimuka Tahun Anggaran Yang Lalu	11.219.520.000
Jurnal Belanja Yang Masih Harus Dibayar	984.390.751
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>263.221.671.240</b>
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Jurnal Balik Atas Beban Tahun Yang Lalu	(12.446.735)
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>(12.446.735)</b>
<b>Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2020</b>	<b>263.209.224.505</b>

#### D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp5.542.212.178,00** dan Rp4.833.703.139,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar **14,66%** dibandingkan dengan Tahun 2019 disebabkan oleh. Banyaknya perbaikan-perbaikan kantor di Bawaslu Kabupaten/Kota yang berasal dari Pinjam Pakai Pemerintah Daerah. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 28. Perbandingan Beban Pemeliharaan 31 Desember 2020 dan 2019**

URAIAN	31-Des-20	31-Des-19	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.284.366.677	952.822.329	34,80
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.214.645.501	3.880.880.810	8,60
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	43.200.000	-	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.542.212.178</b>	<b>4.833.703.139</b>	<b>14,66</b>

Terkait realisasi belanja pemeliharaan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Beban Pemeliharaan pada Laporan Operasional terdapat selisih, berikut hasil mutasi beban barang dan jasa periode 31 Desember 2020.

<b>Mutasi Tambah:</b>	
Belanja Pemeliharaan	5.498.912.178
Beban persediaan untuk pemeliharaan	43.200.000
Jurnal Belanja Yang Masih Harus Dibayar	100.000
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>5.542.212.178</b>
<b>Mutasi Kurang:</b>	
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2020</b>	<b>5.542.212.178</b>

#### D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp68.182.330.785,00** dan Rp123.991.904.701,00. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar **45,01%** disebabkan oleh :

1. Terjadinya penundaan Tahapan dan PSBB diwilayah Jawa Timur yang mengakibatkan beberapa kegiatan tatap muka dilaksanakan via daring selama 3 Bulan;
2. Adanya aturan apabila akan melakukan perjalanan dinas dari Bawaslu Kab/Kota ke Bawaslu Provinsi harus melakukan ijin terlebih dahulu ke Bawaslu Provinsi. Ini salah satu langkah untuk mengurangi pengumpulan orang di Kantor Bawaslu Provinsi.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 29. Perbandingan Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2020 dan 2019**

URAIAN	31-Des-20	31-Des-19	%
Beban Perjalanan Biasa	12.978.767.339	20.559.998.840	(36,87)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.222.190.120	60.602.677.636	(64,98)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	31.830.239.232	39.058.531.319	(18,51)
Beban Perjalanan - Penanganan Pandemi Covid-19	29.400.000	-	100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.121.734.094	3.770.706.906	(43,73)
<b>Jumlah</b>	<b>68.182.330.785</b>	<b>123.991.914.701</b>	<b>(45,01)</b>

Terkait realisasi belanja pemeliharaan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Beban Perjalanan Dinas pada Laporan Operasional terdapat selisih, berikut hasil mutasi beban barang dan jasa periode 31 Desember 2020.

<b>Mutasi Tambah:</b>	
Belanja Perjalanan Dinas	67.584.999.785
Jurnal Belanja Yang Masih Harus Dibayar	597.331.000
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>68.182.330.785</b>
<b>Mutasi Kurang:</b>	
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2020</b>	<b>68.182.330.785</b>

#### D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp3.186.633.391,00** dan Rp3.112.795.300,00. Beban Penyusutan dan Amortisasi mengalami kenaikan sebesar **2,37%** dibanding tahun 2019 merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat

ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 30. Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2020 dan 2019**

URAIAN	31-Des-20	31-Des-19	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.131.183.772	3.100.289.241	1,00
Beban Amortisasi Software	55.187.500	12.375.000	345,96
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	262.119	131.059	100,00
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>3.186.633.391</b>	<b>3.112.795.300</b>	<b>2,37</b>
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah</b>	<b>3.186.633.391</b>	<b>3.112.795.300</b>	<b>2,37</b>

#### D.8 Kegiatan Non Operasional

Jumlah Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp835.683.315,00** dan Rp812.116.929,00. Kegiatan Non Operasional mengalami kenaikan sebesar **2,90%** dibanding tahun 2019.

**Tabel 31. Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 31 Desember 2020 dan 2019**

No	URAIAN	31-Des-20	31-Des-19	%
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	103.846.477		100,00
2	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	68.228.767	808.778.521	(91,56)
3	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	530.894.819	0	100,00
4	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	3.118.548.751	8.896.553	34.953,45
5	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	(117.540.377)	(5.558.145)	2.014,74
6	Beban Persediaan Rusak/Usang	(2.868.295.122)		100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>835.683.315</b>	<b>812.116.929</b>	<b>2,90</b>

#### D.9 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan Rp0,00.

#### D.10 Surplus/Defisit LO

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp375.703.284.811,00** dan Rp496.752.331.601,00.

## E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

### E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp38.961.411.733,00** dan Rp30.239.151.811,00.

### E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar **Rp375.703.284.811,00** dan Rp496.752.331.601,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp391.626.453.139,00** dan Rp505.806.150.251,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 32. Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2020**

No	Transaksi Antar Entitas	Nilai (Rp)
1	Ditagihkan ke Entitas Lain	100.963.864.517
2	Diterima dari Entitas Lain	(209.829.985)
3	Pengesahan Hibah Langsung	290.872.418.607
	<b>Jumlah</b>	<b>391.626.453.139</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

#### E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2020 sebesar **Rp100.963.864.517,00**. Rincian DKEL sebagai berikut:

**Tabel 33. Rincian Ditagihkan ke Entitas Lain Tahun 2020**

URAIAN	31-Des-20
Belanja Pegawai	28.232.012.631
Belanja Barang	72.345.196.556
Belanja Modal	386.655.220
<b>Jumlah</b>	<b>100.963.864.407</b>

#### E.4.2 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)

Diterima ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2020 sebesar **Rp209.829.985,00**. Rincian DDEL sebagai berikut:

**Tabel 34. Rincian Diterima ke Entitas Lain Tahun 2020**

URAIAN	31-Des-20
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	103.846.477
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	37.754.741
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	68.228.767
<b>Jumlah</b>	<b>209.829.985</b>

### E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp290.872.418.607,00** dari total Rp290.872.418.607,00 yang telah diterima sepanjang tahun 2020. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 35. Rincian Pengesahan Hibah Langsung Barang dan Kas Tahun 2020**

Penyedia Hibah	Bentuk Hibah	Telah Disahkan
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN	Uang	11.742.395.000
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO	Uang	13.690.956.600
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK	Uang	10.500.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR	Uang	13.859.549.500
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI	Uang	11.591.811.000
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Uang	25.466.590.000
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER	Uang	21.262.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI	Uang	16.006.965.000
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO	Uang	12.900.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO	Uang	17.772.996.000
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO	Uang	11.159.965.000
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI	Uang	10.733.133.000
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN	Uang	16.565.714.000
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN	Uang	17.454.161.000
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK	Uang	14.000.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP	Uang	23.648.272.000
PEMERINTAH KOTA BLITAR	Uang	4.599.965.000
PEMERINTAH KOTA PASURUAN	Uang	6.521.551.000
PEMERINTAH KOTA SURABAYA	Uang	27.181.660.000
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO	barang	597.660.000
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO	barang	35.683.500
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI	barang	1.903.595.007
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER	barang	1.677.796.000
<b>Total Pengesahan</b>		<b>290.872.418.607</b>

### E.5 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Kenaikan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar **Rp15.923.168.328,00** dan Rp8.722.259.922,00.

**Tabel 36. Kenaikan/Penurunan Ekuitas 31 Desember 2020 dan 2019**

Kenaikan/Penurunan Ekuitas	31-Des-20	31-Des-19
Surplus/Defisit LO	(375.703.284.811)	(496.752.331.601)
Lain-Lain	0	(331.558.728)
Transaksi Antar Entitas	391.626.453.139	505.806.150.251
<b>Jumlah</b>	<b>15.923.168.328</b>	<b>8.722.259.922</b>

### E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp54.884.580.061,00** dan Rp38.961.411.733,00. Nilai ekuitas akhir merupakan akumulasi nilai ekuitas awal sebesar Rp38.961.411.733,00 ditambah kenaikan ekuitas sebesar Rp15.923.168.328,00.

## F. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

### F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

#### a) Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 0001/ K.BAWASLU/KU.01.00/ I/ 2020 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum ditetapkannya Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan; Berdasarkan Keputusan Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 05/JI/SET/KU.01.00/I/2020 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020.

#### Semula:

Kuasa Pengguna Anggaran : Triyono  
Pejabat Pembuat Komitmen : Anditya Sentana M  
Pejabat Penandatanganan SPM : Pitut Fariana  
Bendahara Pengeluaran : Reny Trijayanti

#### Menjadi:

Kuasa Pengguna Anggaran : Sapni Syahril  
Pejabat Penandatanganan SPM : Pitut Fariana  
Pejabat Pembuat Komitmen ADM : Arif Priyono  
Bendahara Pengeluaran ADM : Reny Trijayanti  
Pejabat Pembuat Komitmen PWS : Keke Esketario  
Bendahara Pengeluaran PWS : Aditya Pramono  
Pejabat Pembuat Komitmen PPPSH2DI : Tangguh Gradhianta  
Bendahara Pengeluaran PPPSH2DI : Fauziah Roikhatul Jannah

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor 0033/BAWASLU/SJ/KP.04.00/I/2020 tanggal 15 Januari 2020, Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor 0217/BAWASLU/SJ/KP.04.00/II/2020 tanggal 7 Februari 2020, Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor 0481/BAWASLU/SJ/KP.04.00/II/2020 tanggal 26 Februari 2020, telah diangkat pejabat struktural sebagai berikut:

1. Kepala Bagian Administrasi (**Dr. Jufri Syahrudinm, S.STP.,M.Si**)
  - a. Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara (**Pitut Fariana,S.Si**)
  - b. Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia dan Umum (**Arif Priyono, S.E**)
2. Kepala Bagian Pengawasan (**Filber Sidabutar, S.AP.,M.AP.**)
  - a. Kepala Subbagian Pengawasan dan Akreditasi Pemantau (**Keke Esketario, S.IP., M.A**)
  - b. Kepala Subbagian Hubungan Antar Lembaga (**Nanang Priyanto, S.E**)
3. Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses (**Teguh Rifai, S.H.,M.H**)

- a. Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran
- b. Kepala Subbagian Penyelesaian Sengketa Proses
- 4. Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi (**Lucia Martina Dewi Billem, S.H.,M.H**)
  - a. Kepala Subbagian Hukum
  - b. Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi (**Supratikno, S.E**)

**b) Rekening Satuan Kerja**

Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengelola 61 Rekening satker yang terdiri dari:

- 1 Rekening Satker yang dikelola oleh BP;
- 19 Rekening Satker untuk menampung dana Hibah Pilkada yang dikelola BPP;
- 41 Rekening Satker untuk menampung dana APBN yang dikelola BPP.

**c) Hibah Barang**

Tahun 2020 Satker Bawaslu Provinsi Jawa Timur mendapatkan Hibah Barang dari Pemerintah Daerah Situbondo, Jember, Ngawi dan Mojokerto untuk Kegiatan Tahapan Pengawasan Pilkada serentak berupa **APD** untuk Bawaslu Kabupaten Situbondo, Jember, Ngawi dan Mojokerto (**Bast Terlampir**)

Untuk nilai Hibah Barang pada Bawaslu Kab. Mojokerto merupakan nilai estimasi, dikarenakan tidak terdapat nilai hibah pada Nota Perjanjian (BAST).

**d) Jurnal Koreksi**

Pada tahun 2020 Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengusulkan jurnal koreksi atas temuan BPK dapat kami jelas sebagai mana tabel dibawah:

No	Kode Akun	Nama Akun	Jumlah	
			Debet	Kredit
1	522113	Beban Langganan Air	848.900	
2	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		848.900
3	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	848.900	
4	522112	Beban Langganan Telepon		848.900
Penjelasan Jurnal	Terjadi kesalahan jurnal yang seharusnya nilai Kota Batu Tersebut masuk pada Jurnal untuk Langganan Air tetapi masuk di Jurnal untuk Langganan Telepon.			
1	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	173.517.800	
2	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19		Rp 173.517.800
Penjelasan Jurnal	Pencatatan Aset Termogun di 15 Bawaslu Kabupaten/Kota yang menggunakan Jenis Belanja 52			
1	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	850.000	
2	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	14.300.000	
3	593111	Beban Persediaan Konsumsi		Rp 15.150.000
Penjelasan Jurnal	Pencatatan Aset Termogun di 3 Bawaslu Kabupaten/Kota yang menggunakan Jenis Belanja 52			
1	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	11.488.000	
2	521111	Beban Keperluan Perkantoran		Rp 11.488.000
Penjelasan Jurnal	Pencatatan Aset Termogun di 11 Bawaslu Kabupaten/Kota yang menggunakan Jenis Belanja 52			
1	166111	Aset Lain-lain	87.929.778	
2	111822	Kas Lainnya di Kementerian/Lembaga dari Hibah		Rp 87.929.778
Penjelasan Jurnal	Koreksi atas ketekoran Kas Hibah pada Bawaslu Kab. Situbondo hasil telaah Inspektorat			